

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
RAKOR SINERGITAS PROGRAM PPPA DALDUK KB DAN
SOSIALISASI RUMAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA KECAMATAN BERDAYA**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai upaya mendorong sinergitas program urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung pencapaian ASTA CITA Presiden dan Wakil Presiden serta Visi Misi Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota tahun 2025 -2029, perlu adanya komitmen bersama instansi perangkat daerah yang menangani urusan PPPA Dalduk KB baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Implementasi penjabaran program prioritas Presiden dan Kepala Daerah melalui Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana harus ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan strategis di perangkat daerah secara kolaboratif lintas sektor. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah telah membuat 6 Misi Jawa Tengah dengan 136 Program yang terdiri dari 11 program prioritas, 22 program intervensi, 61 program aksi dan 42 program taktis.

Beberapa program yang harus dintervensi oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah antara lain 1. Program Intervensi yaitu memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak; mendorong pembentukan RPPA dan disabilitas di setiap Kecamatan; 2. Program Aksi yaitu pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan dan pelaku ekonomi kreatif, serta sport center); 3. Program Taktis yaitu mendorong terciptanya PUG yang berkeadilan.

Pada saat ini, permasalahan dan isu strategis urusan PPPA yang masih ada di Jawa Tengah antara lain masih rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen, masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kekerasan berbasis gender online (KBGO), Implementasi PUG di daerah masih belum terintegrasi secara optimal, masih rendahnya Implementasi komitmen Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten/Kota, intervensi 15 Kelompok AMPK masih belum maksimal, belum optimalnya data sektoral yang terpilah serta sinergitas data antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan permasalahan dan isu strategis urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah kurangnya tenaga lapangan untuk mendukung program KB karena terbatasnya jumlah PLKB, belum optimalnya

implementasi kampung keluarga berkualitas yang mandiri dan berkelanjutan serta masih belum optimalnya pemanfaatan GDPK dalam perencanaan pembangunan kependudukan.

Salah satu Program Intervensi Gubernur Jawa Tengah untuk mendorong kinerja urusan PPPA dan Dalduk KB yaitu, Program Kecamatan Berdaya. Program ini diluncurkan dengan tujuan menjadikan kecamatan sebagai pusat pemajuan ekonomi, kreativitas, dan inklusi sosial bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan generasi muda kreatif yang didalamnya adalah Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA). RPPA adalah sistem layanan berbasis di tingkat kecamatan, RPPA diselenggarakan dengan memberikan perlindungan, pendampingan, dan akses rujukan bagi perempuan dan anak korban kekerasan atau yang termasuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Sistem layanan RPPA di Kecamatan Berdaya ini terhubung dengan sistem perlindungan di tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota serta Provinsi sebagai satu kesatuan dari sistem perlindungan perempuan dan anak di tingkat Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna meningkatkan kinerja program dan kegiatan antara Dinas P3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan OPD yang membidangi urusan PPPA dan Dalduk KB Kabupaten/Kota, akan diadakan Rakor Sinergitas Program PPPA Dalduk KB dan Sosialisasi RPPA sebagai salah satu upaya optimalisasi kinerja PPPA dan DALDUK KB di Jawa Tengah.

B. Dasar

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2022 Nomor 13);
4. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

5. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 0007/0001565 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
6. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Kecamatan Berdaya.

C. Maksud dan Tujuan

1. Penyelarasan program dan kegiatan urusan PPPA dan Dalduk KB di Jawa Tengah;
2. Mendorong implementasi pembentukan RPPA pada Kecamatan Berdaya se-Jawa Tengah.

D. Harapan

1. Adanya keselarasan program dan kegiatan urusan PPPA dan Dalduk KB antara Dinas P3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dan OPD PPPA Dalduk KB Kabupaten/Kota.
2. Komitmen pembentukan RPPA di 140 Kecamatan Berdaya.

II. PELAKSANAAN

A. Waktu dan Tempat

Rakor Sinergitas Program PPPA Dalduk KB dan Sosialisasi RPPA rencananya akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 9 September 2025

Tempat : Aula Monumen Gedung PKK, Kab. Semarang

Jam : 08.30 s/d selesai

B. Peserta

Peserta Rakor Sinergitas Program dan Sosialisasi Kecamatan Berdaya sebanyak 130 orang, terdiri dari OPD PPPA Dalduk KB Kabupaten/Kota, NGO/Lembaga, dan internal Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah.

C. Narasumber

Narasumber Rakor Sinergitas Program dan Sosialisasi RPPA antara lain :

- a. BKKBN Perwakilan Jawa Tengah
- b. Fatkhurozi, S.Pd.i

D. Penyelenggaraan

- a. Pembukaan
- b. Lagu Indonesia Raya
- c. Doa
- d. Sambutan dan pengantar

- e. Materi Narasumber
- f. Tanya jawab dan diskusi
- g. Kesimpulan

III. ANGGARAN

Kegiatan Rakor Sinergitas Program dan Sosialisasi Kecamatan Berdaya Tahun Anggaran 2025 pada DPA Perubahan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

IV. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Rakor Sinergitas Program dan Sosialisasi RPPA sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI JAWA TENGAH

